

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (faristina, 2011 dalam Nurillah 2014).

2.1.2 Teori Kegunaan- keputusan (*Decision-usefulness Theory*)

Teori kegunaan-keputusan (decision-usefulness Theory) informasi akuntansi telah dikenal sejak tahun 1954 dan menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards* (FASB), yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat (Staubus:2000 dalam Oktarina Kuntari, 2017). Pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama lain yaitu *a theory of accounting to investors* (Staubus, 2003 dalam Oktarina Kuntari 2017). Kegunaan keputusan informasi akuntansi mengandung komponen komponen yang perlu dipertimbangkan oleh penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan pengambil keputusan dapat menggunakannya (Oktarina Kuntari, 2017).

Sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar akuntansi berhubungan dengan kepentingan terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan (Nurlaila, 2014 dalam Oktarina Kuntari, 2017). Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Adapun kaidah kaidah tersebut harus sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dibuat sehingga memenuhi tujuannya yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Oktarina Kuntari, 2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.1.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan berpedoman pada standar yang telah ditentukan. Dalam hal ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Di mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (Tsaniyah Ubaidah, 2017).

Pemerintahan melalui KSAP pada tanggal 22 Oktober 2010 mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akruwal (Abdul, 2011). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang dimaksud SAP adalah: Prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, SAP merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak saat analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah (Munasyir, 2015), sehingga standar akuntansi pemerintah ini merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Astika Rahmawati *et all*, 2018).

Pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai dua basis yaitu SAP berbasis akrual dan SAP menuju akrual (Oktarina Kuntari 2017).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan PP No 71 tahun 2010 tentang SAP pada lampiran ke II disebutkan bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lain nya pada terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lain nya saat kas diterima atau dibayar (Munasyir, 2015).

Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintah adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik (Rahayu, 2014 dalam Oktarina Kuntari 2017). Dengan adanya SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informai keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan keputusan baik ekonomi, sosial maupun politik (Oktarina Kuntari 2017).

Dalam buku Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual yang ditulis oleh Abdul Hafis Tanjung (2011) bahwasanya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual tersebut terdiri dari kerangka Konseptual dan 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yaitu:

1. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggrana Berbasis Kas
3. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
4. PSAP 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
5. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP 07 tentang Aset Tetap
8. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
9. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban
10. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi akuntansi, dan Operai yang tidak dilanjutkan
11. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi
12. PSAP 12 tentang Laporan Operasional

Kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual juga berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, akan tetapi apabila terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dengan standar, maka ketentuan standar di unggulkan relatif terhadap kerangka konseptual (Abdul, 2011).

Instansi pemerintah mulai dari tahun 2015 harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yaitu berbasis akrual (Putriasri Pujanira *et all*, 2017). Dengan adanya SAP diharapkan agar semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat (Oktarina Kuntari, 2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.4 Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan (pemerintahan) daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak Reformasi Tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang “mereformasi” berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah (pemda). Salah satu bagian dari manajemen keuangan daerah tersebut adalah akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bentuk tata usaha dalam manajemen keuangan daerah selain tata usaha umum atau administrasi. Akuntansi keuangan tersebut merupakan bagian dari akuntansi sektor publik (Pemerintah). Tingkatan tertinggi dari sektor publik adalah tingkatan negara. Oleh karenanya, akuntansi keuangan daerah juga berhubungan dengan akuntansi keuangan negara.

Sejalan dengan diterbitkannya paket UU tentang keuangan negara, yakni UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, dan UU nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka sebagai konsekuensinya adalah penyesuaian dan amandemen atas peraturan perundangan sebelumnya. Dalam kaitan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah maka diterbitkan UU nomor 23 tahun 2004 sebagai pengganti UU nomor 22 tahun 1999, dan UU nomor 33 tahun 2004 sebagai pengganti UU nomor 25 tahun 1999. Selain itu muncul peraturan perundangan yang diamanatkan oleh UU terdahulu,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian diamandemen kembali pada tahun 2010. PP yang berpayung hukum dengan UU yang telah diamandemen tentu harus menyesuaikan dan atau mengalami perubahan atau revisi. PP Nomor 105 tahun 2000 misalnya, diganti dengan PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan akuntansi keuangan daerah.

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah “pengorganisasian dan pengelolaan sumber sumber daya atau kekayaan pada suatu daerah untuk mencapai tujuan ang dikehendaki daerah tersebut (Abdul Halim, 2008).

a. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah (Abdul Halim, 2008).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abdul Halim (2008:35) definisi akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi – transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen – dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara.

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD adalah :

- Neraca
- Laporan Realisasi Anggaran dan
- Catatan atas Laporan Keuangan (Nurillah, 2014).

2.1.5 Sumber Daya Manusia

Istilah sumber daya manusia (human resources) merujuk kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Istilah ini merupakan kekayaan yang dimiliki seseorang yang bersumber dari dalam dirinya. Sumber daya tersebut dapat berupa pengetahuan, kemampuan, keterampilan, bakat, kepemimpinan dan lain-lain. Arti penting sumberdaya manusia bermula pada kenyataan bahwa manusia merupakan elemen yang selalu ada pada perusahaan atau organisasi.

Jenis sumberdaya dapat dikelompokkan ke dalam sumber daya yang berasal dari bakat almiah seseorang namun ada juga sumber daya yang datang dari proses pendidikan dan kebiasaan mengerjakan sesuatu. Dalam hubungannya dengan perusahaan, sumber daya manusia adalah nilai yang tak terhitung harganya. Sebab keberlanjutan siklus hidup perusahaan bergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang ada didalamnya. Kalau dirinci secara spesifik, faktor dibalik keberhasilan maupun kegagalan sebuah perusahaan adalah manusia, Jadi, Manusia adalah Penentu keberhasilan perusahaan atau sebuah organisasi (Arfan Ikhsan, 2008).

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes) (Nurillah, 2014).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Nurillah (2014), untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005 dalam Nurillah, 2014). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

2.1.6 Sistem Pengendalian Intern

Pada Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya:

- efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- keandalan Laporan Keuangan;
- pengamanan aset negara; dan
- ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Nurillah, 2014).

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan (PP No. 60 tahun 2008 dalam Akhmad 2014). Sedangkan menurut Nurillah (2014) Pengendalian intern didefinisikan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud).

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pengendalian intern akuntansi. Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.
2. Pengendalian administratif. Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan (Nurillah, 2014).

Wilkinson et al., (2000) dalam Nurillah (2014) menyebutkan subkomponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (1) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

catatan bernomor; (2) pemisahan tugas; (3) otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi; (4) pemeriksaan independen atas kinerja; dan (5) penilaian yang sesuai/tepat atas jumlah yang dicatat.

Sedangkan dalam permendagri No 13, tahun 2016 ayat 3, tingkat efektifitas SPIP daerah diukur berdasarkan terpenuhinya 5 kategori yaitu : (1)Terciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, (2) Terselenggaranya penilaian resiko, (3) terselenggarakan aktivitas pengendalian, (4) terselenggarakannya sistem informasi dan komunikasi, dan (5) terselenggaranya kegiatan pemantauan.

- a. Hubungan Sistem Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan sistem pengendalian internal menurut Warren et all dalam Tuti Herawati (2014) salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem intern, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dalam akuntansi dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (internal control).

Weygandt et all dalam Tuti Herawati (2014) mengungkapkan bahwa: “Jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Dengan ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem akuntansi, maka sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap), dan dapat diaudit (Auditabel).

Mahmudi (2007: 27) dalam Tuti Herawati (2014) menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

2.1.7 Laporan Keuangan Pemerintah

Dalam menghasilkan laporan yang berkualitas maka setiap entitas harus membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum atau dalam internasional dikenal dengan International Accounting Standards Board (IASB) yang sekarang disebut dengan International Financial Reporting Standar (IFRS) (Iatridis, 2010) sebagai prasyarat dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam perusahaan. Sama halnya dengan perusahaan, pemerintah juga harus dapat menghasilkan laporan keuangan dengan mengacu standar yang berlaku dalam pemerintahan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan baik (Nugraheni & Subaweh, 2008 dalam Siska Yulia, 2018).

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003 dalam Nurillah, 2014).

Menurut Mahmudi (2007:11) dalam Tuti Herawati (2014) definisi laporan keuangan adalah: “Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas”.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah: “Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan” (Tuti Herawati, 2014).

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah pusat dan daerah harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, pemerintah pusat juga menerbitkan beberapa peraturan pemerintah (PP) menyangkut pengelolaan keuangan daerah diantaranya, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah diatur dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang berkekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dalam SAP terdapat empat persyaratan karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu; Relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami. Kesesuaian laporan keuangan dengan SAP sangat menentukan kualitas LKPD (Akhmad Sariudin, 2014).

a. Kualitas dan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Relevan

Relevan dalam laporan keuangan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dari mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan berikut ini:

- Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- Memiliki manfaat prediktif (predictive value), Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- Tepat waktu, Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- Lengkap, Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- Dapat Diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud dalam laporan keuangan (Siska Yulia, 2018).

2.2 Teori Menurut Pandngan Islam

Sesungguhnya islam dari dulu sudah mngajarkan dan menjelaskan dalam al-Quran tentang mengatur keuangan seperti akuntansi. Dalam al-Quran mencapai nilai akuntansi yang baik dan laporan keuangan yang berkualitas ayat yang dapat menjadi rujukan itu adalah surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
 مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
 أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
 فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن
 تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
 وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكَتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
 وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan

Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat diatas menjelaskan tentang pencatatan dalam akuntansi,serta menjelaskan konsep identifikasi dalam proses akuntansi, serta ayat diatas juga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan agar catatan transaksi dapat dipahami, serta mencatat transaksi haruslah dengan benar agar laporan yang dihasilkan relevan dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dalam al-Quran surah An-Nisa (4) Ayat 58 walau tidak secara spesifik menjelaskan tentang akuntansi, tapi ayat ini dapat dijadikan landasan seorang akuntan dalam bekerja, yaitu mencatat suatu transaksi sesuai dengan posisinya.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*

2.3 Kerangka Konseptual

Model penelitian yang digunakan untuk menganalisis Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Sistem Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dapat dilihat pada gambar 1 berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Nordiawan (2006) dalam Astika, Wayan dan Lilik (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara standar akuntansi pemerintah pada kualitas laporan keuangan, yaitu SAP diterapkan dilingkungan pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun daerah, sehingga penerapan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

H1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

B. Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Permendagri Nomor 13, 2006; 16-17) adalah sebagai berikut. :

- a. Tertib
- b. Taat pada perundang undangan
- c. Efektif
- d. Efisien
- e. Ekonomis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Transparan
- g. Bertanggung jawab
- h. Keadilan
- i. Kepatuhan
- j. Manfaat untuk masyarakat

Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah (Abdul Halim, 2008).

Menurut Abdul Halim (2008:35) definisi akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

Dengan demikian jika suatu daerah sudah menerapkan sistem akuntansi daerah dengan baik maka suatu daerah tersebut akan mampu memberikan laporan keuangan yang memiliki pengidentifikasian yang memadai, memiliki ukuran dan pencatatan yang relevan serta laporan keuangannya akan mampu menjadi pedoman bagi berbagai pihak untuk mengambil keputusan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H2 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Istilah sumber daya manusia (human resources) merujuk kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Istilah ini merupakan kekayaan yang dimiliki seseorang yang bersumber dari dalam dirinya. Sumber daya tersebut dapat berupa pengetahuan, kemampuan, keterampilan, bakat, kepemimpinan dan lain-lain. Arti penting sumberdaya manusia bermula pada kenyataan bahwa manusia merupakan elemen yang selalu ada pada perusahaan atau organisasi (Arfan Ikhsan, 2008).

Laporan keuangan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kemampuan atau kapabilitas sumber daya manusia dengan kompetensi informasi laporan keuangan.

H3 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Hubungan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Tujuan sistem pengendalian internal menurut Warren et all dalam Tuti Herawati (2014) salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (internal control).

Weygandt et all dalam Tuti Herawati (2014) mengungkapkan bahwa: “Jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Dengan ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem akuntansi, maka sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap), dan dapat diaudit (Auditabel).

Indriasari dan Nahartyo (2008) dalam Nurillah (2014) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatan waktu dan keterandalan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini dimaksudkan menguji kembali pengaruh pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan.

H4: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan dijelaskan penelitian penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Sistem Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tuti Herawati pada tahun 2014 yang berjudul Pengaruh sistem pengendalian Intern (X) Terhadap kualitas laporan keuangan (Y) (survei pada organisasi perangkat daerah pmda Cijanjur), hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Pengaruh sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 83%. Secara parsial, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi, hanya lingkungan pengendalian, penilaian resiko, dan informasi dan komunikasi yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman juga telah melakukan penelitian pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh kompetensi sumber daya manusia (X1), Penerapan Standar Akuntansi pemerintah (X2), dan penerapan standar akuntansi keuangan daerah (X3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) provinsi DIY. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama, berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari penelitian tersebut didapatkan hasilnya yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY ditunjukkan dengan persamaan regresi, $F_{hitung} = 23,133$ dan $R^2_{y(1,2,3)} = 0,410$.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurillah pada tahun 2014 yang berjudul Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia (X1) , Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X2),Pemanfaatan teknologi informasi (X3) dan Sistem Pengendalian Intern (X4) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah (Y) (studi empiris pada SKPD kota Depok). Penelitian yang dilakukan di SKPD kota Depok ini mendapatkan hasil bahwa Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan daerah, semakin baik pengendalian intern nya maka kualitas laporan keuangan akan semakin bagus pula begitu pun sebaliknya.

Penelitian yang berjudul Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh Purwaniati

Nugraheni dan Imam Subaweh pada tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan. . Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, namun Penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan setelah diterapkan di BPK RI karena lemahnya pengendalian Intern serta tidak patuhnya terhadap peraturan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, & Lilik Handaya Eka pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), dan Sistem Pengendalian Intern (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) SKPD Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi standar akuntansi pemerintah, utilisasi teknologi informasi, dan sistem kontrol intern secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|--|---|
| | | penerapan standar akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY | | 2.Penerapan Standar Akuntansi pemerintah 3.penerapan standar akuntansi keuangan daerah | pemerintah, dan penerapan standar akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY |
| 3 | Nurillah (2014) | Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia , Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah),Pemanfaatan teknologi informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah (studi empiris pada SKPD kota Depok) | Kualitas Laporan Keuangan daerah | 1.Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia 2.Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah 3. Pemanfaatan teknologi informasi 4. Sistem Pengendalian Intern | Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan daerah, semakin baik pengendalian intern nya maka kualitas laporan keuangan akan semakin bagus pula begitu pun sebaliknya. |
| 4 | Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh (2008) | Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan | kualitas laporan keuangan | Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah | 1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|--|---|
| | | | | | yang telah diterapkan di Inspektorat jendral pendidikan nasional 2. Penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan setelah diterapkan di BPK RI karena lemahnya pengendalian Intern serta tidak patuhnya terhadap peraturan pemerintah |
| 5 | Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, & Lilik Handaya Eka (2018) | Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan | Kualitas Laporan Keuangan | 1.Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, 2.Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan 3.Sistem Pengendalian Intern | variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern menunjukkan hasil yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | |
|-----------------|---|---|--|---|
| Munasyir (2015) | Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Aceh Utara | Kualitas Laporan Keuangan satuan kerja perangkat daerah | 1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 2. sistem pengendalian intern pemerintah | Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Aceh Utara |
|-----------------|---|---|--|---|

Sumber: Berbagai Jurnal